

TANDA TERIMA PENGIRIMAN SURAT/LAPORAN/DOKUMEN LAIN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN

Sudah terima dari	BPR PRIN	A RUAL	Sauge	18A	******************
Uraian Dokumen	LAR. TAMA SEMPOSA	Katola Muur 2	RAR	PRIVAR	RIAN
Jumlah	1 Csapro				
Jenis Dokumen	: All/Tembusan	/Copy			******************
Sifat Dokumen	: Biaa/Rahasia	у сору			
Ditujukan Kepada	: Biasa/Rahasia Cogk	PROVINGi	Rusy		
Yang menerima, Jul Horrord No. Agenda Unit Kear			ang Men	24 14 Prahkan, Pleka	ei 2021
Yang menerima,		Ya	ng Menye	erahkan,	



BPRprima PT. BPR PRIMA RIAU SENTOSA

Pekanbaru, 21 Mei 2021

Nomor: 106 / DIR/BPR-PRS/V/2021

KepadaYth

Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Up. Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau

Jln. Arifin Ahmad No.35 Marpoyan Damai

Pekanbaru

Perihal

: Pelaporan Penerapan Tata Kelola (GCG) dan Self Assesment

PT. BPR Prima Riau Sentosa tahun 2020

Bersama ini kami sampaikan pelaporan Penerapan Tata Kelola dan Self Assesment PT. BPR Prima Riau Sentosa.

Demikian disampaikan. Atas kerja sama baiknya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. SPR Prima Riau Sentosa

Nofartzal

Direktur Utama

Sugiyanto Direktur

Tembusan : Dewan Komisaris Arsip



BPRprima PT. BPR PRIMA RIAU SENTOSA

Pekanbaru, 28 Mei 2021

Nomor: 108/DIR/BPR-PRS/V/2021

KepadaYth

KETUA PERBARINDO

Di

Jakarta

Perihal

: Pelaporan Tata Kelola (GCG) dan Self Assesment PT. BPR

Prima Riau Sentosa tahun 2020

Dengan hormat,

Bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Tata Kelola dan Self Assesment PT. BPR Prima Riau Sentosa periode tahun 2020.

Demikian disampaikan, Atas kerja sama baiknya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT. BPR Prima Riau Sentosa

Nofarizal

Direktur Utama

Sugiyanto

Direktur

Tembusan : Dewan Komisaris

Arsip



BPRprima PT. BPR PRIMA RIAU SENTOSA

Pekanbaru, 28 Mei 2021

Nomor: 109/DIR/BPR-PRS/V/2021

KepadaYth

MEDIA BPR

Perihal

: Pelaporan Tata Kelola (GCG) dan Self Assesment PT. BPR

Prima Riau Sentosa tahun 2020

Dengan hormat,

Bersama ini terlampir kami sampaikan Laporan Tata Kelola dan Self Assesment PT. BPR Prima Riau Sentosa periode tahun 2020.

Demikian disampaikan, Atas kerja sama baiknya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami, PT. BPR Prima Riau Sentosa

<u>Nofarizal</u>

Direktur Utama

ugiyanto

Direktur

Tembusan : Dewan Komisaris Arsip





LAPORAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (TATA KELOLA) TAHUN 2020



PT. BPR PRIMA RIAU SENTOSA

Jl. Dr. Setia Budhi No. 168-170 Kelurahan Rintis, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru





















DAFTAR ISI LAPORAN TATA KELOLA PT. BPR PRIMA RIAU SENTOSA TAHUN 2020

		Hal
Daftar	Isi	1-2
Kata P	engantar	3
BAB.I	PENJELASAN UMUM	4-5
BAB.II	TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA	6
1.	Pengungkapan Penerapan Tata Kelola	6
	a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi	6-8
	b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris	9-10
2.	Kepemilikan Saham	10
	a. Kepemilikan saham anggota Direksi pada BPR	10
	b. Kepemilikan saham anggota Direksi pada Perusahaan lain	10
3.	Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau Pemegang Saham BPR	11
	a. Hubungan keuangan anggota Direksi pada BPR	11
	b. Hubungan keluarga anggota Direksi pada BPR	11
4.	Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris	11
	a. Kepemilikan saham anggota dewan komisaris pada BPR	12
	b. Kepemilikan saham anggota dewan komisaris pada Perusahaan lain	12
5.	Hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR	12
	a. Hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris pada BPR	12
	b. Hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris pada BPR	12
6.	Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS	13
	a. Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS	13



b. Uraian fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan RUPS	13
7. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah	13
8. Frekuensi rapat Dewan Komisaris	14
a. Pelaksanaan rapat dalam 1 (satu) tahun	15
b. Kehadiran anggota Dewan Komisaris	13
9. Jumlah penyimpangan internal	15
	15
10. Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi	15-16
11. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan	
12. Pemberian dana untuk kegiatan Sosial dan kegiatan Politik	16
13. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas/fungsi komite	16
14. Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal	17-18
15. Batas Maksimum Pemberian Kredit	18
Penerapan Manajemen Riskiko termasuk sistem pengendalian intern	18
17. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank	18
18. Rencana Bisnis Bank	19-21
KESIMPULAN KERTAS KERJA HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)	21-22
Penutup	23
Lampiran:	
I. Kertas Keria Tata Kelola BPR	

- II. Kesimpulan Umum Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR



KATA PENGANTAR

Salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh Bank Perkreditan Rakyat yakni self assessment penerapan Good Corporate Governance (GCG) yang ditetapkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.04/POJK.03/2015 tentang "Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa , kami bersyukur bahwa self assessment atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang baik telah kami laksanakan dengan hasil penilaian predikat composit "Sangat Baik "

Kami menyadari dengan adanya pengelolaan yang baik dan transparansi yang memadai niscaya BPR Prima Riau Sentosa mampu bertahan dan terus tumbuh didalam situasi semakin tingginya tingkat persaingan dunia perbankan saat ini.

Kepada insan PT.BPR Prima Riau Sentosa dari seluruh tingkatan dan jenjang mulai dari Pengurus serta karyawan untuk terus memperbaiki kinerjanya dan melaksanakan seluruh peraturan dan ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku baik intern maupun extern yang terkait dengan pengelolaan industri perbankan untuk terujudnya tata kelola perusahaan yang baik.

Akhirnya melalui laporan ini kami mengucapkan terimakasih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Riau yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan untuk terujudnya tata kelola yang baik dalam setiap aktivitas operasional PT.BPR Prima Riau Sentosa pada perkembangan bisnis yang berorientasi pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat khususnya UMKM.

Pekanbaru , 17 Mei 2021 PT.BPR PRIMA RIAU SENTOSA.

> <u>Nofarizal</u> Direktur Utama



BAB I PENJELASAN UMUM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, yang sarat dengan ketentuan (highly regulated industry) karena berkaitan dengan jasa pelayanan dan pengelolaan dana masyarakat maka perbankan merupakan industri yang berbasis kepercayaan (Trust).

Gearing ratio atau ratio kewajiban terhadap modal yang sangat tinggi membuat bisnis perbankan menjadi industri keuangan yang memiliki tingkat risiko sangat tinggi pula, sehingga pelaksanaan/penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan.

Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan peraturan nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat pada tahun 2015, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Transparansi adalah prinsip keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang materil dan relevan termasuk juga keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan agar pengelolaan berjalan secara fleksibel dan sesuai dengan fungsinya.
- Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan.
- Independensi adalah pengelolaan BPR secara professional tanpa pengaruh atau tekanan pihak manapun.
- Kewajaran adalah keadilan atau keseteraan hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan perundang-undangan.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) prinsip tatakerlola tersebut atau penerapan GCG merupakan instrument yang strategis bagi BPR untuk dapat menciptakan BPR yang dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, dengan menerapkan etika bisnis yang baik, sehingga dapat mewujudkan iklim usaha perbankan yang sehat dan transparan. Komitmen BPR terhadap penerapan GCG yang konsisten akan mampu menjauhkan BPR dari berbagai masalah yang berisiko tinggi terhadap kelangsungan usaha BPR.

Laporan penerapan tata kelola di PT BPR PRIMA RIAU SENTOSA tahun 2020 disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan pelaksanaan tata kelola di PT BPR Prima Riau Sentosa disusun selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.05/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.



Berikut adalah pokok-pokok laporan penerapan tata kelola selama tahun 2020 :

- 1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- 2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris
- 3. Kepemilikan Saham Anggota Direksi
- 4. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi Dengan Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi Lain dan/atau Pemegang Saham BPR
- 5. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris
- 6. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR
- 7. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Komisaris
- 8. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah
- 9. Jumlah Penyimpangan Intern
- 10. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh BPR
- 11. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan
- 12. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik
- 13. Hasil Penilaian (Self Assesment) dan Kesimpulan Umum



BAB II TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

Na	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi							
No								
1	Nama : NOFARIZAL							
	NIK *) : 1471071709560001							
	Jabatan : Direktur Utama							
	Tugas dan Tanggung :							
	Jawab							
	a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR.							
	b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan							
	perundang-undangan, antara lain:							
	1) Menghimpun dana;							
	2) Menempatkan dana pada bank lain;							
	3) Menerima penempatan dana dari bank lain;							
	4) Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas							
	persetujuan Dewan Komisaris.							
	Sehubungan dengan penetapan Direktur Utama merangkap sebagai							
	direktur membawahkan fungsi Kepatuhan & Manajemen Risiko,							
	maka khusus terkait dengan <i>penyaluran kredit</i> kewenangan dan tanggungjawabnya dialihkan kepada Direktur Bisnis.							
	Dalam rangka memperkuat fungsi pengendalian khususnya							
	penyaluran kredit dan fungsi-fungsi lain yang bersifat strategi Direktur Utama juga memberikan opini/review dalam rangk pengawasan dini.							
	c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh							
	tingkatan atau jenjang organisasi.							
	d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan ker							
	atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit							
	intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris,							
	Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang							
	memadai.							
	f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang							
	saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan							
	perundang-undangan.							
	g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang							
	kepegawaian kepada pegawai.							
	h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat							
7	waktu kepada Dewan Komisaris. Nama : SUGIYANTO							
2	Nama : SUGIYANTO NIK *) : 1471070210630001							
	,							
	Jabatan : Direktur							



Tugas dan Tanggung Jawab

- a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR
- b. Menghimpun dana;
- c. Menyalurkan kredit;
- d. Menempatkan dana pada bank lain;
- e. Menerima penempatan dana dari bank lain;
- f. Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Direktur Utama dan Dewan Komisaris
- g. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja.
- h. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko dimana direktur bisnis merupakan risk owners terutama terkait dengan bidang perkreditan yang merupakan sumber utama pendapatan BPR.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- 1) Dalam rangka evaluasi Kinerja tutup buku tahun 2019 dimana KPI terkait perspective Financial secara keseluruhan telah dicapai antara lain Realisasi rentabilitas dan DPK khusus deposito, maka Dewan Komisaris merekomendasikan agar yang belum tercapai seperti Kyd yang baru mencapai 94.25% dan kwalitas Aktiva Produktif tercermin dari NPL yang turun dari posisi NPL 0.43% thn 2018 menjadi 2.19% ditahun 2019, Tabungan baru tercapai 83.85% dan target BOPO dibawah 70% juga belum tercapai menjadi perhatian untuk ditingkatkan/diperbaiki.
- 2) Realisasi Kinerja tahun 2019 tersebut diatas diharapkan dapat diperbaiki/dicapai pada penetapan matrix Goal Seting/KPI tahun 2020 yakni : target perspective financial dengan memperhatikan/melaksanakan strategi pengembangan bisnis, kinerja manajemen risiko dan compliance serta kinerja manajemen pengembangan SDM yang merupakan satu kesatuan dalam goal setting/KPI tahun 2020.
- 3) Rekomendasi Dekom terkait Issue strategis pencapaian KYD dan sumber dana murah dari tabungan yang belum tercapai tersebut agar di inisiasi dengan pengembangan bisnis di captive market yang masih ada peluang untuk ditingkatkan antara lain teruskan program hadiah replanting untuk menarik KUD lain yang belum bekerjasama, pedekatan kepada kelompok tani dll yang tertuang dalam Matrix target 2020.
- 4) Terkait dengan konfirmasi temuan OJK, agar ditindak lanjuti segera sesuai komitmen dan tidak terjadi temuan berulang.
- 5) Menyampaikan dokumen Rencana Bisnis BPR tahun 2020 kepada OJK yang selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh SDM untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan KPI masing-masing unit hasil cascading dari RBB 2020.



- 6) Sehubungan merebaknya pandemi covid-19, maka Direksi dan jajarannya untuk taat/mematuhi aturan terkait Pembatasan Sosial Berskal Besar(PSBB) yang telah ditetapkan pemerintah, atau protokol kesehatan sekaligus meningkatkan konsumsi vitamin yang telah diberikan oleh BPR dalam rangka salah satu upaya preventif/pencegahan penularan Covid-19 kepada SDM BPR Prima Riau Sentosa. Terkait dengan dampaknya pada pemenuhan kewajiban debitur agar melaksanakan penyelamatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui POJK 11 dengan menyusun kembali ketentuan intern atas POJK 11 dimaksud.
- 7) Telah Menjaga/memelihara agar kualitas kredit dan pengelolaan BPR yang mengacu pada tata kelola yang baik dapat dilaksanakan dengan baik, tercermin dari hasil ratio CAMEL dapat dinyatakan sehat.
- 8) Dewan Komisaris juga telah memberikan arahan dan rekomendasi agar Tahun 2020 BPR Prima Riau Sentosa merencanakan untuk meningkatkan portofolio kredit dengan melakukan diversifikasi usaha pada sektor ekonomi diluar perkebunan, untuk menurunkan tingkat konsentrasi pada sektor ekonomi perkebunan yang menjadi temuan OJK antara lain perdagangan eceran/retail,kontraktor,peternakan dan sektor-sektor usaha lainnya diluar perkebunan, yang tentunya memiliki risiko yang membutuhkan konsentrasi pembagian kerja yang lebih optimal pada masing-masing Direksi.
- 9) Laporan Keuangan tahun 2020 yang diaudit oleh KAP Drs. Abdul Muntalib & yunus, telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, juga telah mendapatkan persetujuan dari Dekom dan RUPS.
- 10) Dalam rangka memberikan motivasi atas kinerjanya, dan persetujuan dewan Komisaris berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris telah menetapkan dalam Surat keputusan sebagai berikut:
 - a. Penetapan kenaikan Gaji Pengurus dengan pertimbangan, Direksi telah memberikan sumbangsihnya sejak BPR Prima berdiri/beroperasi tgl 16 Des 2013 sampai dengan laporan keuangan 30 Des 2020 tumbuh secara progresif.
 - b. Penyesuaian/kenaikan gaji Sumber Daya Manusia dengan memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja khususnya BPR dan kenaikan harga barang/inflasi selama tahun 2020.
 - c. Memberikan motivasi kepada Sumber Daya Manusia untuk terus meningkatkan kinerja terbaiknya kepada Perusahaan
- 11) Sehubungan dengan persiapan penyusunan RBB- 2021 yang harus disampaikan ke OJK paling lambat 15-12-2020, beberapa issue strategis yang disampaikan oleh Dekom untuk menjadi perhatian Direksi terkait dengan matrix KPI tahun 2021 yang harus dicapai thn 2021. Dan RBB tersebut juga dimintakan untuk dilakukan cash cading dan sosialisasi kepada unit-unit terkait sehingga menjadi Goalsetting KPI tahun 2021 untuk dapat dicapai secara optimal.



- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- **) Termasuk tindak lanjut atas rekomendasi Dewan Komisaris yang belum dilaporkan dalam laporan penerapan Tata Kelola tahun sebelumnya.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Мо	Pelaksanaan Tug	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi				
1	Nama	: RICHARD KOE				
	NIK *)	: 3173082011700007				
	Jabatan	: Komisaris Utama				

Tugas dan Tanggung

Jawab

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

2	Nama	:	ONG HENDRA
	NIK *)	:	5171030809590001
	Jabatan	:	Komisaris

Tugas dan Tanggung :

Jawab

- a. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- b. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung iawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- c. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- d. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
 - 1) pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
 - 2) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
- e. Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris.
- f. Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.

Rekomendasi Dekom kepada Direksi:

1) Hasil ealuasi realisasi Kinerja tahun 2019 yang belum tercapai



- sepenuhnya terutama pencapaian BOPO, Kyd dan Tabungan, meskipun secara keseluruhan BPR Prima mampu menciptakan Laba sesuai target dan dilihat dari sisi Camel maka Kinerja keuangan tahun 2019 dinilai baik.
- 2) Penyampaian hasil tindak lanjut temuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai komitmen bersama secara tepat waktu dan memastikan tidak ada yang terlewati.
- 3) Memelihara kualitas kredit yang disalurkan memperhatikan prinsip kehati-hatian berdasarkan evaluasi konsep 5'C yang akan menghasilkan penilaian terhadap Willingness to pay dan ability to pay terhadap setiap calon debitur/debitur.
- 4) Memberikan persetujuan dan penetapan kenaikan gaji, tunjangan dan bonus kepada pengurus terhitung sejak tanggal 25 Januari 2020.
- 5) Memberikan persetujuan penggunaan akuntan publik dan pengesahan laporan keuangan tahun 2020 yang telah di audit oleh KAP Drs. Abdul Muntalib&Yunus.
- 6) Menjaga tingkat kesehatan BPR Prima sesuai dengan ketentuan Otoritas.
- 7) Melaksanakan penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan program APU dan PPT sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 8) Melakukan evaluasi kinerja bulan Nop-2020 sekaligus Pemberian persetujuan kepada Direksi atas RBB-2021 yang akan disampaikan kepada OJK. Setelah mendapatkan persetujuan OJK agar Direksi melakukan sosialisasi RBB 2021 tersebut kepada seluruh unit kerja untuk menjadi pedoman dalam pencapaian kinerja tahun 2021.

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	-	-	-	-
2	_	-	-	_

^{*)} NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-

⁾ NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.



- *) NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- **) Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

			Hu	Hubungan Keuanga			
No	No Nama Anggota Direksi	NIK *)	Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham		
1	Tidak ada		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		
2	Tidak ada		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- **) Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh "Bapak A Pinjaman".
 - Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
 - Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Tidak Ada".

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

			Hubungan Keluarga **)			
No	Nama Anggota Direksi	NIK *)	Anggota Direksi Lain	- DAWan		
1	Tidak ada		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
2	Tidak aa		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- **) Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh "Bapak A Pinjaman".
 - Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
 - Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Tidak Ada".

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Nominal (Rp penuh)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Richard Koe	3173082011700007	4.800.000.000,00	80%



2	Ong Hendra	5171030809590001	Tidak ada	Tidak ada
---	------------	------------------	-----------	-----------

^{*)} NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

N o	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Sandi Bank Lain*)/**)	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Richard Koe	3173082011700007	602689	PT. BPR PRIMA JAMBI MANDIRI	75%
2	Ong Hendra	5171030809590001	-	Tidak ada	Tidak ada

^{*)} NIK dan sandi bank lain hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keyangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

- 4								
				Hubungan Keuangan **)				
	No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham		
	1	Tidak ada		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		
	2	Tidak ada		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada		

^{*)} NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).
- Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Tidak Ada".

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

			Hubungan Keluarga **)			
No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK *)	Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham	
1	Tidak ada		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	
2	Tidak ada		Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	

^{*)} NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

^{**)} Dalam hal perusahaan lain merupakan bank lain, sandi yang dilaporkan sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai laporan bulanan bank perkreditan rakyat.

^{**) -} Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama - Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh "Bapak A - Pinjaman".

^{**) -} Dalam hal terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Nama - Hubungan Keuangan". Hubungan keuangan dapat berupa antara lain menerima dan/atau memberikan penghasilan, bantuan keuangan, pinjaman, dan/atau menjadi penjamin atau mendapat jaminan, contoh "Bapak A - Pinjaman".

⁻ Dalam hal anggota Direksi memiliki hubungan keuangan dengan lebih dari satu pihak pada masing-masing kolom, maka dapat ditambahkan dengan dipisahkan oleh tanda koma (,).

⁻ Dalam hal tidak terdapat hubungan keuangan, diisi dengan "Tidak Ada".



F. KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

	Jenis Remunerasi		Direksi	Dewan Komisaris		
No	(dalam 1 tahun)	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	
		Orang	Keseluruhan (Rp)	Orang	Keseluruhan (Rp)	
1	Gaji *)	2	582.444.576	2	369.602.100	
2	Tunjangan	2	106.984.142	2	33.959.040	
3	Tantiem	-	•	-	-	
4	Kompensasi	-	-		00	
	berbasis saham					
5	Remunerasi	2	65.029.000	2	51.264.000	
	lainnya **)					
	Total		754.457.718		454.825.140	

^{*)} Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)							
110	(dalam 1 tahun)	Direksi	Dewan Komisaris						
1	Perumahan	-	-						
2	Transportasi	-	-						
3	Asuransi Kesehatan	Rawat Inap (Mandiri	Rawat Inap (Mandiri						
		Inhealth), Rawat Jalan dan Medical Check up	Inhealth), Rawat Jalan dan Medical Check up						
		(Reimbursement) serta BPJS	(Reimbursement) serta BPJS						
		Kesehatan - 4 fasilitas	Kesehatan - 4 fasilitas						
		asuransi kesehatan	asuransi kesehatan						
4	Fasilitas Lainnya *)	-	_						

^{*)} Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi.

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Kotorangan *)	Per	Perbandingan		
Keterangan *)	(a/b)	:	1	
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	7,29	:	1	
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,29	:	1	
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,46	:	1	
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,68	:	1	
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,52	:	1	

^{**)} Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.



 *) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun, diantaranya sebagai berikut:

. Pela	ksanaan Rapat D	alam 1(satu) T	(satu) Tahun,diantaranya sebagai berikut :				
No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan				
1	16 Jan 2020	2 orang	 Evaluasi Kinerja tutup buku thn 2019 dibandingkan dengan RBB-2019. Rencana dan langkah-lankah strategis jangka pendek terkait dengan perbaikan rencana RBB untuk tahun 2020. Perbaikan kompetensi SDM khususnya dibidang perkreditan dan credit fecovery. 				
2	08 April 2020	2 orang	 Evaluasi realisasi rencana bisnis s/d triwulan-1/2020. Langkah strategi untuk memperbaiki kinerja tersebut. 				
3	22 Juli 2020	2 orang	 Evaluasi realisasi Kinerja RBB akhir semester-1/2020. Langkah strategis jangka pendek terhadap kondisi penurunan KYD dan kwalitas Aktiva Produktif khususnya KYD akibat dampak pandemi covid-19 dan strategi non financial yang harus diperbaiki untuk pencapaian KPI 2020. 				
4	07/10/2020	2 orang	 Evaluasi Kinerja Direksi Triwulan III (Jul sd Sept) 2020, terdapat pertumbuhan kredit dan laba. Penurunan NPL dari bulan sebelumnya dan pelaksanaan lelang aset debitur an. Paridin di KPKNL. Tingkat kesehatan BPR Prima per September 2020. Penurunan NPL meskipun belum sesuai harapan, Cash Ratio naik dan telah sesuai serta BOPO yang cendrung turun menunjukkan adanya perbaikan efisiensi, namun belum mencapai target. 				
5	11/12/2020	2 orang	 Evaluasi Kinerja bulan Nov-2020 sekaligus pemberian persetujuan atas RBB-2021 yang diusulkan oleh Direksi kepada OJK yang direncanakan paling lambat 15 Des-2020. Memberikan Matrix KPI kepada Direksi termasuk strategi yang harus dijalankan oleh Direksi dan jajarannya guna 				



mencapai target-target baik perspective
financial maupun non financial.

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Richard Koe	3173082011700007	Tidak	Ya	100%
2	Ong Hendra	5171030809590001	Ya	Tidak	100%

I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

_								
jumlah		Jum	ılah kas	us yang	dilakuka	n oleh		
Penyimpangan	Direksi	Dewan	Dewan Pegawai Tetap			ewan Pegawai Tidak		i Tidak
Internal*) (Dalam 1	Direksi	Komisaris		regaw	ai ietap		Te	tap
Tahun)	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	1	nihil	nihil
Telah Diselesaikan		nihil		nihil		done		nihil
Dalam proses	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
penyelesaian**)	HIIII	1111111	1111111	HIHIL	HIIII	HIHIC	HIHIL	HIHIL
Belum diupayakan	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
penyelesaiannya***)	HIIII	1111111	1111111	HIHIIC	HIHIL	111111	HIHIL	1111111
Telah								
ditindaklanjuti		nihil		nihil		nihil		nihil
melalui proses		1111111		1111111		HIHIC		HIIII
hukum								

Tahun 2020 terdapat fraud yang dilakukan oleh Kasi Umum dan HRD untuk unit kerja umum sehingga terdapat kerugian finansial sebagaimana telah disampaikan sebelumnya oleh Pejabat Executive Audit Intern pada tanggal 04 Januari 2021 dengan surat No.001/DIR/BPR-PRS/I/2021.

J. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)		
reilliasalallali Hukulli	Perdata	Pidana	
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	nihil	nihil	
Dalam proses penyelesaian	nihil	nihil	
Total	nihil	nihil	

K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

(posisi laporan tahun 2020)



No	Pihak yang Ke	Memiliki B pentingan	enturan	Pengai	mbil Keput	usan	Jenis Transa	Nilai Transaksi	Keteran
110	Nama	Jabatan	NIK*)	Nama	Jabatan	NIK*)	ksi	(Jutaan Rupiah)	gan**)
	Tidak ada			Tidak ada			Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

(posisi laporan tahun 2021 dan seterusnya)

- *) NIK hanya disampaikan dalam pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- **) Keterangan diisi dengan:
- Kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian transaksi dengan ketentuan intern; dan
- Menjelaskan keterkaitan antara pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan pengambil keputusan.

Selama Tahun 2020 sd sekarang, Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

BPR Prima Riau Sentosa turut berpartisipasi dalam beberapa kegiatan kemasyarakatan yang dilaksanakan selama tahun 2020 sebagai berikut :

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	25/02/2020	sosial	Acara diklat Kabupaten Kampar	Ketua Panitia diklat	250.000
2	26/02/2020	sosial	HUT SMAN 2 Gunung Sahilan	Kepsek	250.000

M. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

PT. BPR Prima Riau Sentosa belum membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Remunerasi. Sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR, BPR yang wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi adalah BPR dengan modal inti paling sedikit Rp 80.000.000.000 (delapan puluh milyar rupiah).

N. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL

Dalam pelaksanaan fungsi pengendalian bisnis BPR, dimana terdapat suatu konsep hubungan atau mekanisme kerja antara fungsi kepatuhan, manajemen risiko, internal audit dan unit bisnis yang dekembangkan dengan mengadopsi konsep tree lines of defence (tiga lini pertahanan) sebagai bagian dari system pengendalian internal, maka pertahanan lapis kedua (second line) dan lapis ketiga (third line of defnce) telah menjalankan fungsinya sbb:



a) Fungsi Kepatuhan

Fungsi Kepatuhan Bank meliputi tindakan untuk:

- 1) Mewujudkan terlaksananya Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank.
- 2) Mengelola Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank.
- 3) Memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan dan /atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Dalam pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, sepanjang tahun 2020 Bank senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mematuhi berbagai ketentuan perbankan yang berlaku dengan berpedoman kepada tindakan Fungsi Kepatuhan Bank, sehingga diharapkan potensi risiko yang akan muncul dapat diantisipasi lebih dini.

Direktur Utama telah ditunjuk melalui RUPS sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan, dan telah dilakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan dengan keputusan Bahwa Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan berdasarkan surat keputusan OJK No.S.717/KO.053/2017 tanggal 25 Oktober 2017.

Direksi telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku tercermin dari laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala melaporkan kepada Dewan Komisaris.

Direksi telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Direksi dan Audit Internal dalam pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan Bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Melakukan koordinasi dengan unit kerja atau membuat aturan internal baru sehubungan dengan adanya perubahan atau penerbitan ketentuan baru dan memastikan bahwa peraturan baru diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b) Fungsi Audit Internal

Pelaksanaan fungsi audit internal berpedoman pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank. PT. BPR Prima Riau Sentosa telah melaksanakan fungsi audit internal, telah dilaksanakannya audit/pemeriksaan internal oleh PE Audit Internal sepanjang tahun 2020. Laporan Pelaksanaan dan Pokok-pokok Hasil Audit Internal 2020 sudah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.



PE Audit Internal melaksanakan pemeriksaan secara Bulanan, Tiga Bulanan atau Semester dan Audit Khusus sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.

PE Audit Internal membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya peling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen.

PE Audit Internal memberikan saran perbaikan dan informasi objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

PE Audit Internal telah melakukan fungsi pengawasan secara independen dengan cakupan tugas yang memadai dan sesuai dengan rencana, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit.

Dalam melaksanakan tugasnya, PE Audit Internal wajib menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan.

c) Fungsi Audit Eksternal

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Transparansi Laporan Keuangan, maka Direksi diberi kewenangan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Untuk melaksanakan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2020 ditunjuk KAP Drs. Abdul Muntalib&Yunus. Dalam melakukan pemeriksaan, Auditor mampu bekerja secara independen dan profesional, telah bertindak obyektif dalam melakukan audit. Cakupan hasil audit telah sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

O. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

- 1) Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan penyediaan dana kepada pihak terkait.
- 2) Bank telah menyampaikan laporan BMPK setiap bulan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

P. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

- 1) PT. BPR Prima Riau Sentosa telah melakukan proses penerapan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dengan membuat rencana tindak penerapan manajemen risiko dan melaporkan realisasi rencana tindak penerapan manajemen risiko.
- 2) Peningkatan kualitas proses pengendalian intern Bank, difokuskan pada pembenahan sistem dan prosedur untuk menjamin akuntabilitas proses dan prinsip *dual control* pada setiap pelaksanaan transaksi.

Q. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

- 1) Bank telah menyusun SOP tentang Informasi Produk Bank dan SOP Pengaduan Nasabah.
- 2) Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan secara transaparan.



- 3) Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
- 4) Bank telah mempublikasikan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.

R. Rencana Bisnis Bank

1. Rencana Bisnis Bank (RBB) 2020

Pada Tahun 2020 BPR Prima Riau Sentosa telah menyusun rencana bisnis dengan memperhatikan seluruh faktor internal dan eksternal serta prinsip kehati-hatian. Rencana strategis Bank yang dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank telah sesuai visi dan misi serta strategi Bank yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris, dan terakhir mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pedoman kerja untuk dapat dicapai selama tahun 2020.

Rencana bisnis tersebut juga telah dikomunikasikan kepada seluruh jenjang organisasi sebagai pedoman untuk pencapaian KPI tahun 2020.

2. Realisasi RBB-2020.

Realisasi rencana bisnis tersebut telah sesuai dengan rencana perusahaan dengan kinerja yang cukup baik, walaupun pencapaian masih ada beberapa yang di bawah target yang telah ditetapkan.

Realisasi atas RBB-2020 juga telah disampaikan ke OJK baik untuk semester-1/2020 maupun semester-11/2020.

Sebagai gambaran dapat kami jelaskan kembali terkait dengan realisasi RBB-2020 tersebut sbb :

a. Rasio Keuangan utama dan Rasio Pos-pos Tertentu

Perkembangan indikator keuangan selama semester-II tahun 2020 menunjukkan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Capital Adequacy Ratio (CAR) 29.44 % dengan tingkat pertumbuhan sebesar 0.33 %.

 Perhitungan atas CAR/KPMM tersebut diatas menggunakan format bobot dalam perhitungan ATMR berdasarkan SEOJK No.24/SEOJK.03/2019 tgl 13 Nov 2019 tentang kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR maka CAR/KPMM realisasi Desember 2020 meningkat menjadi +/- 29.44 %.
- 2) NPL yang dianggarkan pada rencana Semester-II/2020 sebesar 2,09% dan pada realisasi Semester-II/2020 NPL berhasil dicapai dengan NPL lebih rendah dari Target yakni menjadi sebesar 1,59%, dengan target yang ditetapkan sebesar 2.09% dengan deviasi sebesar 0.50%.
- 3) Loan to Deposit Ratio (LDR) pada realisasi Desember 2020 sebesar 72.83 % belum memenuhi target yang ditetapkan dengan ratio 73,51%



- 4) Cash Ratio pada Realisasi Semester-II/2020 sebesar 7,20 % telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 6,04 %. Cash Ratio tersebut dilihat dari sisi indikator kesehatan Bank dinilai sehat.
- 5) Indkator rentabilitas/earning acuannya adalah berupa ratio ROA menunjukkan realisasi ratio 3,95 % belum memenuhi target yang sebesar 4,41 % pada rencana Semester II/2020, namun masuk kategori sehat.
- 6) Salah satu indikator efisiensi yakni Ratio BOPO, realisasi s/d semester-II/2020 sebesar 74,14 %, dibandingkan rencana Semester-II/2020, dengan ratio BOPO 71,88 %. mencerminkan target ratio BOPO belum tercapai, namun jika dilihat dari sisi indikator kesehatan bank dinilai sehat, meskipun pada semester-II/2020 menunjukkan penurunan tingkat efisiensi.

Dari indikator ratio tingkat kesehatan tersebut diatas, menunjukkan bahwa kondisi keuangan BPR Prima Riau Sentosa dari beberapa indikator mengalami penurunan yang tidak lepas dari kondisi perekonomian yang cendrung menurun tajam akibat dampak pandemi covid-19, yang mempengaruhi perekonomian secara global, namun kondisi ratio keuangan PT.BPR Prima Riau Sentosa masih dikategorikan sehat.

b. Realisasi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Realisasi Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) selama Semester II tahun 2020 dapat dilihat di tabel dan Grafik diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) DPK khusus penghimpunan dana Tabungan dengan pencapaian 111,17 % dibandingkan dengan rencana untuk semester-II/2020 dan DPK dalam bentuk deposito dengan pencapaian 92,93 % atau sebesar Rp 4.676.295 ribu, jika dibandingkan dengan target semester-II/2020.
- 2) Realisasi DPK pada Semester II/tahun 2020 secara keseluruhan belum mencapai target atau realisasi sebesar 99,47% dari target semester-II/2020.

Dari sisi fungsi intermediasi, maka DPK s/d Semester-II/2020 antara DPK pihak terkait dengan DPK pihak tidak terkait menunjukkan pertumbuhan yang cukup mengembirakan, tercermin dari share : 34,98 %: 65,01 %.



c. Penyaluran Dana Kepada Pihak Ketiga

Realisasi penyaluran dana atau Kredit Yang Diberikan (KYD) yang terdiri dari Kredit Modal Kerja, Kredit Investasi, dan Kredit Konsumsi selama Semester II Tahun 2020, secara keseluruhan mendekati pencapaian , tercermin dari rencana KYD sebesar Rp, 87.990.353 ribu, dapat tercapai Rp 87.804.044 ribu, atau secara persentase tercapai 99,79 %.

Target Kredit Yang Diberikan untuk Modal Kerja (KMK) Semester II sebesar Rp 65.086.464 ribu dapat direalisasikan Rp. 51.496.439 ribu atau tercapai dengan prosentase 79,12 %.

Kredit Investasi (KI) dari target sebesar Rp 19.709.839 ribu, realisasi diatas target sebesar Rp 29.613.209 ribu dan tercapai dengan prosentase 150,25 %, Sedangkan untuk Kredit Konsumsi (KK) dari target sebesar Rp 3.194.049 ribu dapat direalisasikan Rp 6.694.395 ribu atau Secara persentase tercapai sebesar 209,59 %.

Tindak lanjut dan upaya untuk memperbaiki pencapaian realisasi RBB diantaranya tetap meningkatkan efisiensi dan peningkatan *skill* seluruh SDM.

Upaya dalam menghimpun dana pihak ketiga yang murah dalam bentuk tabungan prima maupun deposito dengan tearing dibawah Rp. 500 juta. Pelaksanaan terus ditingkatkan dengan menambah fresh money dari new customer ataupun mempertahankan customer exsisting yang setia untuk dapat dipelihara dengan baik.

Maintenance merupakan salah satu upaya untuk mengatasi dan menjaga kolektibilitas kredit melalui pendekatan kepada debitur secara berkala guna mengetahui perkembangan usaha, agunan serta mengetahui sedini mungkin kepada debitur yang mengalami kesulitan.

Surat teguran, surat peringatan juga dilakukan langsung ke debitur secara intensif, sesuai dengan day past due dan melakukan proses hukum bagi debitur yang menunggak sampai dengan 6 bulan.

Penekanan prosentase NPL dengan Strategi penyelesaian kredit bermasalah secara comprehensive dengan tenaga team credit recovery yang solid dan secara terus menerus untuk meningkatkan kompetensinya.

Kesimpulan Umum Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR PRIMA RIAU SENTOSA periode tahun 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Nilai komposit Tata Kelola sebesar 1.45 dengan predikat "SANGAT BAIK"
- b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut:

No	Faktor yang Dinilai	Nilai (S + P + H)	Nilai (Dibobot)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1.16	0.23



2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.28	0.19			
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	0.00				
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.00	0.10			
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.36	0.14			
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.03	0.20			
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	1.00	0.03			
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.89	0.19			
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.60	0.20			
10	Rencana Bisnis BPR	1.00	0.07			
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.70	0.13			
	Nilai Komposit					
	Predikat Komposit					

Catatan:

Matrix/Kertas kerja atas penilaian self assessment (terlampir).

c. Kelemahan dan Komitmen

Walaupun secara keseluruhan hasil Predikat komposit penilaian Tata Kelola tahun 2020 tergolong "SANGAT BAIK", namun dalam pelaksanaannya masih diperlukan adanya perbaikan dan penyempurnaan atas segala kelemahan dan kekurangan yang ditemukan. Sejalan dengan pengembangan usahanya, BPR Prima Riau Sentosa akan tetap berkomitmen dalam penerapan Tata Kelola secara konsisten serta melakukan penyempurnaan yang berkesinambungan atas pelaksanaan aspek Tata Kelola.



PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola (Good Corporate Governance) merupakan upaya prefentif seluruh proses kerja di PT.BPR PRIMA RIAU SENTOSA selama satu tahun melalui pendekatan fungsi tata kelola atas pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR Prima Riau Sentosa agar tidak terdapat pelanggaran/penyimpangan seluruh kebijakan, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Penerapan Tata Kelola periode 30 Desember 2020 yang telah kami susun, sebagai gambaran komprehensif atas hasil usaha manajemen dan seluruh jajaran PT. BPR Prima Riau Sentosa guna mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik. Perbaikan akan terus kami lakukan agar selaras dengan regulasi yang berlaku baik dari pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan.

Kami menyadari bahwa Laporan Pelaksanaan Tata Kelola ini masih perlu penyempurnaan, kami terus berupaya untuk menjadi yang terbaik guna mewujudkan BPR Prima Riau Sentosa sebagai perusahaan yang berkwalitas bagi seluruh Stake Holder.

Apabila dikemudian hari ditemukan data atau informasi penting yang belum dilaporkan, maka akan segera dilakukan pengkinian terhadap laporan ini.

Pekanbaru , 17 Mei 2021 PT. BPR PRIMA RIAU SENTOSA

NOFARIZAL
Direktur Utama *)

RICHARD KOE Komisaris Utama

*) Merangkap Direktur membawahkan fungsi Kepatuhan & Manris.

KESIMPULAN UMUM PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

Nama BPR : PT BPR PRIMA RIAU SENTOSA

Alamat : JL. DR. SETIA BUDHI NO. 168-170, PEKANBARU

Nomor : 0761-28503

Posisi : Desember 2020

Modal Inti : Rp. 18.098.528.786,00
Total Aset : Rp. 129.837.082.039,00

Berdasarkan hasil penilaian sendiri pelaksanaan GCG PT BPR PRIMA RIAU SENTOSA periode Desember 2020, disampaikan hal-hal berikta. Nilai komposit GCG sebesar 1.47 dengan predikat Sangat Baik

b. Nilai masing-masing faktor adalah sebagai berikut.

No	Faktor yang Dinilai	Nilai	Nilai
	1 411.6 2 1111.6	(S + P + H)	(Dibobot)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	1.16	0.23
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1.28	0.19
	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR		
3	yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00	0.00	
	(delapan puluh milyar rupiah)		
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1.00	0.10
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1.36	0.14
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	2.03	0.20
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling	1.00	0.03
7	sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	1.00	0.03
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	1.89	0.19
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	2.60	0.20
10	Rencana Bisnis BPR	1.00	0.07
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1.70	0.13
	Nilai Komposit		1.47
	Predikat Komposit		Sangat Baik

KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi

				Ska	la Penera	apan				
N.	Kriteria / Indikator		SB	В	СВ	KB	ТВ	Votorangan		
No		•	1	2	3	4	5	Keterangan		
1		ksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi								
	A. St	ruktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		1	1	1	1			
	1)	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	٧					telah terpenuhi sesuai dengan perpanjangan anggaran dasar No. 12 tanggal 28 Mei 2019		
	2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	٧					Anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama pada provinsi yang sama		
	3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	٧					Tidak satupun dari Direksi yang merangkap jabatan pada bank lain maupun perusahaan lainnya serta ikut dalam organisasi politik Semua Direksi sama sekali		
	4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	٧					tidak ada hubungan keluarga baik sesama direksi maupun dengan anggota Dewan Komisaris		
	5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi, untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	٧					Ya, saat ini Direksi tidak ada menggunakan penasehat atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan		
	6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	٧					Ya, anggota Direksi lulus uji kemampuan dan kepatutan yang ditetapkan melalui RUPS dan disahkan oleh notaris No. 12 tgl 28 Mei 2019 termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi juga ditetapkan oleh RUPS tanggal 8 Mei 2019 yang disahkan oleh notaris Zairizal No.7 tgl 17 Mei 2019		
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	6							
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					6			
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah					1,00			
	-	pertanyaan: 6 Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur								
		Tata Kelola (S): 50%					0,50			

B. Pro	oses Penerapan Tata Kelola (P)		T		1	1	T
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	٧					Ya, Direksi memberikan kuasa dengan terbatas dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	٧					Ya, Direksi selalu menindaklanjuti semua temua temuan baik dari pemeriksaar umum audit intern maupun ekstern
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	٧					Ya, Direksi selalu menyiapkar data dan informasi secara lengkap dan akurat baik pada rapat maupun on call secara rutin kepada Dewan Komisaris
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	٧					Ya, hasil keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan musyawarah mufaka
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	٧					Ya, Direksi tidak ada mengambil/menerima keuntungan pribasi dari BPR kecuali menerima gaji dan fasilitas yang diberikan BPR
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	٧					Ya, terbukti dari anggota Direksi selalu mengikutsertaka karyawan/ti semua mengikut pelatihan pelatihan dari penyelenggara pendidikan lainnya secara bergiliran dar kontiniu setiap tahunnya dar juga pelatihan yang dilakukar secara rutin oleh direksi
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehatihatian.			٧			Tidak semua anggota direksi mampu mengimplementasikar kompetensi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	٧					Direksi telah memiliki tata tertib kerja yakni waktu kerja etika kerja, maupun aturan rapat direksi
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	7	0	1	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah					10	
	pertanyaan: 8	1.25					
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola					0.50	
	pertanyaan: 8						

C. Ha	sil Penerapan Tata Kelola (H)						<u> </u>
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	٧					Ya, Direksi sangat bertanggungjawab dalan melaksanakan tugasnya
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	٧					Ya, Direksi selalu mengkomunikasikan menge kebijakan strategis di bida kepegawaian kepada sem pegawai di BPR Prima Riau
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.			٧			sebagian hasil rapat dire tidak mengungkapkan perbedaan pendapat
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.		٧				Ya terdapat peningkata kinerja BPR, penyelesai permasalahan secara berta namun pencapaian ha ekspektasi dari stakeholo belum tercapai
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	٧					Ya, setiap tahun laporan kelola dilaporkan kepada (asosiasi BPR dan majal ekonomi dan keuangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3	1	1	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					8	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5					1.6	
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%					0.16	
	Penjumlahan S + P + H					1.16	
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1: 20%					0.23	

KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

				Skal	a Penera	apan			
No		Kriteria / Indikator	SB	В	СВ	КВ	ТВ	- Keterangan	
2	Pelaks	sanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	1	2	3	4	5		
		uktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		1	1	1		1	
	1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	٧					Ya, jumlah anggota dewan komisaris telah sesuai	
	2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	٧					Ya, jumlah anggota dewan komisaris sama dengan jumlah anggota direksi	
	3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	٧					Ya, sesuai dengan RUPS tanggal 8 Mei 2019 untuk periode kepengurusan BPR tahun 2018-2023, telah menetapkan masa jabatan anggota dewan komisaris	
	4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	٧					Ya, salah satu angggota dewan komisaris bertempat tinggal di kota pekanbaru dengan lokasi kantor pusat BPR juga berada di kota pekanbaru	
	5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,000 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,000 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		٧				BPR Prima Riau tidak ada Komisaris Independen	
	6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		٧				Ya, terdapat tata tertib kerja Dewan Komisaris	
	7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		٧				Tidak terdapat rangkap jabatan pada BPR lainnya	
	8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		٧				Tidak terdapat hubungan keluarga baik sesama direksi maupun dewan komisaris	
	9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		٧				Tidak terdapat hubungan keuangan, kepengurusan dan kepemilikan saham dengan pemegang saham pengendali	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	4	5	0	0	0		
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		•	•	•	14	•	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 9					1.56		
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					0,78		

B. Pro	ses Penerapan Tata Kelola (P)				
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	٧			Ya, dewan komisaris rutin melakukan rapat koordinasi dengan direksi, terbukti dar hasil notulen notulen rapat
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	٧			Ya, terbukti dari notulen rapa yang rutin dilakukan
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	٧			Ya, dewan komisaris tidak lag terlibat dalam pengambilan keputusan pada kegiatan operasional BPR hanya saja melakukan review dalam rangka pegawasan dini untu biaya biaya yang relatif besa dan memperkuat pengendalia internal.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	٧			Ya, hal tersebut telah dilakuka
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	٧			Ya, telah dilaksanakan terbuk dari notulen rapat yang ada
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	٧			Dalam hal pengambilan keputusan yeng bersifat strategis selalu dilakukan berdasarkan suara terbanyal sesuai ketentuan yang berlaku
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	٧			tidak ada terjadi benturan kepentingan yang dilakukar oleh anggota dewan komisari:
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	٧			Ya, anggota dewan komisari selalu memantau pelaksanaa tugas direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	8			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			8	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 8			1,00	
	Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%			0,40	

C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)					
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	٧		1 '		
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1				
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1			
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1	1				
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	,				
	Penjumlahan S + P + H		1,28	1 1,00 0,10		
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2: 15%		0,19			

KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,000 (delapan puluh milyar rupiah)

				Skal	a Penera	apan		
No		Kriteria / Indikator			СВ	КВ	Keterangan	
		·	1	2	3	4	5	
3	_	kapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPF	R yang me	emiliki me	odal inti p	oaling sec	likit Rp80	.000.000.000,00 (delapan puluh milya
	A. Strt	uktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S) BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite						
	1)	Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai						
	-'	ketentuan.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1					0,00	
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						
	B. Pro	ses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap						
	2)	penerapan fungsi audit intern.						
	3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						
		Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang						
	4)	dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif						
	'	antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata						
		tertib kerja.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3		0,00				
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	0,00					
	C. Hasi	il Penerapan Tata Kelola (H)						
		Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan						
	5)	audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada						
	ادا	Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi						
		BPR.						
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1					0,00	
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,00					
		Penjumlahan S + P + H					0,00	
		Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3: 0%						

4. Penanganan Benturan Kepentingan

				Skal	a Pener			
No		Kriteria / Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan
NO		·	1	2	3	4	5	Keterangan
4	1	ganan Benturan Kepentingan						
	A. Stru	uktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						_
	1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	٧					Ya, BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terhadap benturan kepentingan dan saat ini belum terdapat benturan kepentingan yang dimaksud
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	0				1 0 7 0
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan				1	1	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1					1,00	
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					0,50	
	B. Pro	ses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan	٧					Saat ini belum terdapat benturan kepentingan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan				1	1	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1					1,00	
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P) : 40%					0,40	
	C. Has	il Penerapan Tata Kelola (H)						
	3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	٧					Belum terdapat benturan kepentingan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan				1	1	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1					1,00	
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%					0,10	
	Penjumlahan S + P + H						1,00	
		Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4: 10%					0,10	

KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR 5. Penerapan Fungsi Kepatuhan

				Ska	la Penera	pan		
No		Kriteria / Indikator	SB	В	СВ	КВ	TB	Keterangan
		•	1	2	3	4	5	Reteraligan
5		an Fungsi Kepatuhan						
	A. Struk	tur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		I				1
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.		٧				Ya, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun untuk nominal nominal tertentu yang dapat mengganggu kondisi keuangan perusahaan dilakukan review saja dalam rangka pengawasan dini dan memperkuat fungsi pengendalian intern.
	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	٧					Ya, karena anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah lulus mengikuti uji kemampuan dan kepatutan.
	3)	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	٧					Ya, telah ada PE yang menangani fungsi kepatuhan sesuai surat keputusan pengangkatan No. 017/DIR/SK/PEFK/XII/2016 tanggal 20 Desember 2016
	4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	٧					Ya, telah dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sampai dengan saat ini
	5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	٧					Ya, Tugas, tanggung jawab dan kewenangan telah dituangkan juga dalam job description sebagai PE Fungsi Kepatuhan
	1	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	5					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	-		1	1	5	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5					1,00	
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					0,50	

В.	. Proses	s Penerapan Tata Kelola (P)						
6))	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	٧					Ya, terbukti dari laporan pelaksanaan tugas tugas Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
7))	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	٧					Secara rutin dilakukan dan selalu dituangkan dalam risalah rapat
8))	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	٧					Ya, terlihat dari secara bertahap dilakukan review dalam bentuk laporan fungsi kepatuhan
9))	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		٧				Ya secara terus menerus dilakukan perbaikan-perbaikan.
10	0)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		٧				Ya, saat ini secara bertahap dalam proses perbaikan, perubahan dan penyempurnaan terhadap semua ketentuan intern BPR Prima
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3	2				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					7	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5				:	1,40	
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%				(0,56	
C.	. Hasil P	l enerapan Tata Kelola (H)						
11	1)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		٧				Ya, cukup berhasil karena lebih dulu ditemukan pelanggaran tersebut dari pihak audit intern BPR
12	2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		٧				Direktur utama yang merangkap membawahkan fungsi kepatuhan per semester ataupun per satu tahun sekali melaporkan tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan
13	3)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		٧				Saat ini belum terdapat penyimpangan pelanggaran yang dilakukan terhadap ketentuan perundangan lainnya
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		3				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					6	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3	n: 3 2,00					
			: 10% 0,20					
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%				(0,20	
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10% Penjumlahan S + P + H					1,26	

KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR 6. Penerapan Fungsi Audit Intern

					la Penera		,	
No		Kriteria / Indikator	SB 1	В 2	CB 3	KB 4	TB 5	Keterangan
6	Penerap	pan Fungsi Audit Intern		_				
	A.Struk	tur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	٧					Ya, terbukti dari telah diangkatnya PEAI dengan SK No.019/DIR/SK/HRD/PRS/VII/20 17 tgl 21 Juli 2017
	2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundangundangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		٧				Ya, telah dilakukan terbukti dari laporan kerja dan rencana kerja dari PEAI yang rutin disampaikan kepada OJK
	3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	٧					Ya, PEAI tidak merangkap jabatan apapun
	4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	٧					Ya, PEAI bertanggungjawab langsung kepada Direktur utama
	5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			٧			saat ini BPR belum melakukan hal yang dimaksud
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3	1	1			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					8	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 5					1,60	
		Dikali dengan bobot A.Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					0,80	
	B.Prose:	s Penerapan Tata Kelola (P)						
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		٧				BPR telah menyusun pedoman dan kebijakan terhadap penyelenggaraan pengawasan intern oleh PEAI dan terus dilakukan perbaikannya.
	7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.			٧			-
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			٧			Ya, hal tersebut telah dilakukan namun masih perlu secara kontiniu untuk dilakukan penyempurnaan dan lebih melihat ke risiko risiko yang signifikan
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			٧			Ya, BPR telah melakukan dengan selalu mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan pelatihan namun belum dilakukan evaluasi oleh pemegang kewenangan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1	2	1			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					8	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 4	agi jumlah 2,00					
		Dikali dengan bobot B.Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%	ata Kelola 0,80					

C. Hasil	Penerapan Tata Kelola (H)							
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	٧				Ya, telah disampaikan terbukti dari laporan yang telah disampaikan oleh PEAI		
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	٧				Ya, PEAI telah menyampaikan laporan pelaksanaan hasil audit dan laporan khusus terhadap penyimpangan yang telah dilakukan oleh pegawai BPR dalam tahun 2020		
12)	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		٧			-		
13)	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	٧				Ya, BPR telah mengangkat PE yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan melaporkannya kepada OJK, terbukti dengan SK No.019/DIR/SK/HRD/PRS/VII/20 17 tgl 21 Juli 2017		
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan				5			
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 4				1,25			
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0,13						
	Penjumlahan S + P + H				1,73			
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6: 10%				0,17			

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)

				1	la Penera	apan	ı	
No		Kriteria / Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
7	Penera	pan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total ase	1 t nalino	2 sedikit I	3 Rn10 000	4	5 0.00 (sen	uluh milyar runiah)
	1	ktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	r pum.g	Jeunne 1	тр 10.000		5,00 (3C)	alan milyar rapiany
	A. Ju	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor						
	1)	Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	٧					Ya, telah sesuai dengan ketentuan dari OJK yang dilaksanakan
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		I	ı	1	1	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1					1,00	
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					0,50	
	B. Pros	es Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	٧					Ya, sesuai dengan hasil persetujuan RUPS tanggal 21 Desember 2020
	3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	٧					Ya, BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada OJK pada tanggal 25 Maret 2021 No. 082/OPR-PRS/III/202
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		II.	II.	1	2	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2					1,00	
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%					0,40	
	C. Hasil	Penerapan Tata Kelola (H)						
	4)	Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	٧					Ya, telah disampaikan denga tepat waktu
	5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	٧					Ya, cakupan hasil audit telal sesuai dengan ruang lingku ketentuan OJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan				•	2	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2					1,00	
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%					0,10	
		Penjumlahan S + P + H					1,00	
		Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7: 2.5%					0,03	

8. Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern

				Skal	a Pener	apan		
No		Kriteria / Indikator	SB	В	СВ	KB	TB	Keterangan
		•	1	2	3	4	5	Reterangun
8		apan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengenc	lalian In	itern				
	A. Stru	ıktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						Ya, sesuai dengan SK
	1)	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	٧					No.032/DIR/SK/PEMR/XII/20 17 tanggal 29 Desember 2017
	2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	٧					Ya, BPR telah memiliki kebijakan dan pedoman tentang Manajemen Risiko dan penetapan limit risiko sesuai dengan SK No.055/DIR/SK/SOP MAn-Risk/XII/2019 tanggal 30 desember 2019
	3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			٧			Terhadap produk dan aktivitas baru, Fungsi Man- Risk BPR Prima memberikan rekomendasi risiko terhadap pelaksanaannya
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2		1			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		ı	ı	ı	5.00	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3						1.67	
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					0,83	
	B. Pro	ses Penerapan Tata Kelola (P)						
	4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	٧					Ya, Direksi telah menyetujui pedoman dan kebijakan terhadap manajemen risiko
	5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.		V				Dekom telah mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, juga memutuskan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang harus persetujuan dari Dekom namun belum secara sempurna terlihat dalam risalah rapat dekom

	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8: 10%	0.18					
	Penjumlahan S + P + H	1.83					
	Kelola (H): 10%	0.20					
	pertanyaan: 2 Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata						
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah					2	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		•			4	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	2				
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		٧				Saat ini BPR tidak ada membuat produk dan aktivitas baru yang memerlukan persetujuan atau izin dari OJK
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		٧				BPR telah menyampaikar laporan profil risiko pada semester II tahun 2020 pad januari lalu kepada OJK yakni Risiko Kredit dan Operasional sesuai moda inti
C Us-							
	pertanyaan: 7 Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%					0.86	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah					2.14	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					15	
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	2	3	0	0	
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			٧			Direksi telah melakukan sosialisasi terhadap penerapan manajemen risiko namun masih perlu secara berkala untuk dilakukan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			٧			Ya, secara bertahap BPF akan memiliki SIMPRO dengan lengkap dan akurat
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		٧				Ya, BPR telah menerapka manajemen risiko sesua ketentuan OJK berdasarka modal ini BPR Prima saat i masih mengelola 2 risiko
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.			٧			BPR telah menerapkan pengendalian intern namu belum secara menyeluruh dan berkesinambungan
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	٧					proses proses penerapar manajemen risiko terhada risiko yang sifatnya materi dan mempengaruhi kondi: keuangan perusahaan

KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR 9. Batas Maksimum Pemberian Kredit

				Skal	la Penera	pan			
No		Kriteria / Indikator	SB 1	В 2	CB 3	KB 4	TB 5	Keterangan	
9	Batas M	laksimum Pemberian Kredit		2	<u> </u>	-			
	A. Struk	tur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)							
	1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.			٧			Saat ini sedang dalam penyusunan ketentuan terkait pinjaman terhadap pihak pihak terkait dan tidak terkait	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan			1				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			ı	<u>l</u>	4		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1					4		
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					2		
	B. Prose	es Penerapan Tata Kelola (P)							
	2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			٧			Ya dilakukan sesuai dengan perundangan yang berlaku	
	3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati- hatian maupun peraturan perundang-undangan.		٧				Ya, pemberian kredit kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang besar selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengar aturan perundangan yang berlaku	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1	1	0			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					5		
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2					2.5		
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%					1.00		
	C. Hasil	Penerapan Tata Kelola (H)							
	4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	٧					Tidak terdapat BMPK pada BPI Prima saat ini	
	5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	٧					Ya tidak ada pelanggaran BMPK	
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2						
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan			•	•	2	•	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2					1,00		
		Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	(elola (H): 0,10						
		Penjumlahan S + P + H					3,10		
		Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9: 7.5%					0,23		

KERTAS KERJA LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR 10. Rencana Bisnis BPR

				Skal	a Penera	pan		
No		Kriteria / Indikator	SB 1	В 2	CB 3	KB 4	TB 5	Keterangan
10	Rencan	a Bisnis BPR			<u> </u>	4		
	A. Stru	ktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	٧					Ya, terbukti dari no surat 095/OPR-PRS/VI/2020 tgl 26 Juni 2020
	2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	٧					Ya, telah sesuai dengan ketentuan OJK dalam penyampaian RBB tahun 2020 baik strategi jangka pendek maupun menengah terkait penghimpnan dan penyaluran dana dan upaya penyelesaian kredit bermasalah yang cukup significant.
	3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	٧					Ya, RBB BPR Prima sepenuhnya di dukung oleh pemegang saham dengan permodalan yang cukup untuk rencana pencapaian target RBB-2020.
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	3					
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					3	
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 3						1	
	Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50% 0.50							
	B. Pros	es Penerapan Tata Kelola (P)						
	4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehatihatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	٧					Ya, RBB telah disusun dengan mencakup penerapan manajemen risiko, adanya faktor intern dan ekstern yang mempengaruhi kelangsungan usaha BPR
	5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	٧					Ya, Dekom telah melaksanakan dan menyampaikan laporan pengawasan RBB tahun 2020, terbukti dari surat penyampaian ke OJK No. 073/KOM/BPR-PRS/II/2021 tgl 26 Februari 2021
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	0	0	0	0	
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					2	·
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2					1	
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%					0.40	

C. Has	il Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	٧					Ya, BPR Prima telah menyampaikan revisi RBB tahun 2020 sesuai dengan ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	1					
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		1				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1					1	
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%					0.10	
	Penjumlahan S + P + H					1.00	
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10: 7.5%					0.08	

11. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

				Ska	la Penera	apan		secara online maupun offline kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK dan dapat memberikan laporan yang akurat dan lengkap
No		Kriteria / Indikator	SB	В	СВ	KB	ТВ	Keterangan
		•	1	2	3	4	5	
11	-	paransi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan						
	A. Stru	ıktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						<u> </u>
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		٧				kepada OJK sesuai dengar
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	0	1				
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan					2.00	
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 1					2.00	
		Dikali dengan bobot A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%					1.00	
	B. Pros	ses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	٧					terbukti dari BPR telah menyampaikan laporan publikasi tahun 2020 per triwulan pada tanggal 13 Ok 2020 no. 156/OPR-PRS/X/2020
	3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	٧					Ya telah sesuai dengan ketentuan OJK
	4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			٧			Ya BPR telah melaksanaka sesuai dengan ketentuan O. terhadap transparansi produ dan layanan lainnya
	5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	٧					Ya, BPR telah menyajikar laporan sesuai dengan ketentuan OJK
		Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2	0	1			
		Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		•	•	•	5.00	1
		Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 4					1.25	
		Dikali dengan bobot B. Proses Penerapan Tata Kelola (P): 40%					0.50	

C. Has	il Penerapan Tata Kelola (H)				
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	٧			Ya, terbukti dari laporan yang dipajang pada masing masing kantor BPR Prima
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	٧			Ya, terbukti dari no surat laporan triwulan ke IV tahun 2020 yaitu 058/OPR- PRS/I/2021 tgl 21 Januari 2021
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	2			
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	2			
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan: 2	1			
	Dikali dengan bobot C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H): 10%	0.1			
	Penjumlahan S + P + H			1.60	
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11: 7.5%	0.12			